

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DI KABUPATEN KATINGAN

Agus Wijaya

Abstract

Seeing the development of the paradigm that has grown in the life of the state since the 1998 reform, it has brought a demand for the creation of clean and good governance in Indonesia. In realizing this, targeted policies are needed, one of which is through the use of Information Technology in the form of e-government. E-Government is the use of information technology by the government in providing options for the public to easily access information in order to increase transparency, accountability, and public participation so that it can be a means of checking and balancing policies and activities carried out by the government.

The results of this study indicate that the development of e-government systems in Indonesia in terms of quantity is starting to increase but in terms of quality this is not sufficient. To further improve the development of e-government in Indonesia both in terms of quantity and quality, it is necessary to have a commitment from the government in perfecting e-development. government, especially in terms of infrastructure, human resources, applications, regulations and socialization within the government and to the community. If done seriously this can support the successful implementation of e-government and be able to improve the quality of public services for the creation of clean and good governance in Indonesia.

Keywords : clean and good governance, E-Government, Katingan

Pendahuluan

Pada hakekatnya, Dengan pertumbuhan era, kehidupan warga hendak berganti dari waktu ke waktu yang berakibat pada segala aspek kehidupan bermasyarakat serta bernegara dan kehidupan bernegara di Indonesia. Semenjak gerakan reformasi tahun 1998, paradigma yang dibesarkan pemerintah Indonesia merupakan perlunya pelayanan yang lebih baik dari tadinya, serta warga masih mempunyai ruang buat berfungsi dan dalam kehidupan bernegara. Atas dasar inilah timbul sebutan “kebersihan serta tata pemerintahan yang baik” di Indonesia. “Tata pemerintahan yang baik” mempunyai makna good governance terpaut dengan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa. Tidak terdapat KKN, transparansi, akuntabilitas, ketaatan pada hukum serta keterbukaan kepada publik. (Bappenas, 2008). Guna mewujudkan Clean and good Governance paling utama dari segi akuntabilitas serta transparansi publik, hingga diperlukan sesuatu langkah kebijakan yang terencana dalam pergantian sistem kelembagaan serta ketatalaksanaan lewat pemanfaatan ICT ialah e- government ataupun Pemerintahan Elektronik. Susartono

(2006) dalam penelitiannya yang bertajuk *egovernment di Indonesia*, merumuskan kalau penyelenggaraan e- government bertujuan buat tingkatkan partisipasi warga. (Sari & Winarno, 2012)

E- Government ialah sesuatu sistem teknologi data yang dibesarkan oleh Pemerintah buat tingkatkan pelayanan publik dengan membagikan opsi kepada warga buat memperoleh kemudahan akses data publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik(*good governance*) serta kenaikan layanan publik yang efisien serta efektif dibutuhkan terdapatnya kebijakan serta strategi pengembangan e- government. Kebijakan serta strategi tersebut diatur dalam Inpres Nomor. 3 Tahun 2003 menimpa Kebijakan serta Strategi Pengembangan EGovernment di Segala Jajaran Pemerintah. Nurcahyati serta Daru(2008) pada Seminar Nasional Informatika yang bertajuk *Kedudukan E- Government dalam Rangka Mewujudkan Good Governance untuk Warga*, merumuskan kalau Sosialisasi e- goverment butuh dicoba secara tidak berubah- ubah, kontinyu kepada warga supaya warga mengenali khasiat yang hendak diperoleh dengan e- government.

Realisasi pengembangan e- government di Indonesia mengalami banyak tantangan baik dalam perihal geografi, ekonomi, teknologi, politik, ataupun budaya. Dalam proses implementasi, ditemui sebagian fenomena yang menampilkan implementasi e- government masih berjalan lelet serta tidak signifikan dengan besarnya bayaran yang dikeluarkan Negeri. Kesenjangan antar wilayah, serta terdapatnya duplikasi database menjadikan informasi produk pemerintah cenderung kurang dipercaya. Sosiawan (2008) dalam penelitiannya yang bertajuk *Tantangan serta hambatan dalam implementasi e- government di Indonesia*, merumuskan kalau implementasi *egovernment di Indonesia* masih separuh jalur, sehingga dibutuhkan penyempurnaan konsep serta strategi penerapan e- government.

Merujuk pada peraturan Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Bupati Katingan No 53 Tahun 2018 Tentang Strategi Menerima Aspirasi Warga Lewat Layanan E- Aspirasi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Kabupaten Katingan. Perihal ini meyakinkan kalau kabupaten katingan melaksanakan suatu pelayanan untuk masyarakat nya dalam inovasi baru ialah dengan sisyem elektronik yang mulai di tahun 2016. mengulik pada latar balik yang sudah dijabarkan tadinya, hingga Riset ini mengkaji tentang daya guna e- goverment yang di terapkan dalam pemerintahan di sesuatu daerah yang diajukan penulis buat mengatahui gimana pertumbuhan pelaksanaan e- government di Indonesia pada biasanya serta pada kabupaten katingan khususnya dalam

mewujudkan clean and good governance serta apa saja tantangan yang di hadapi pemerintah dalam meningkatkan e- government. (Katingan, 2018)

Tinjauan pustaka

A. Hubungan clean government dalam good governance

1. Clean governance adalah Tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan pemerintahan yang terdiri dari pejabat jujur yang berperan cocok dengan tugasnya, tidak melaksanakan KKN(korupsi, kolusi, serta nepotisme), dan bisa berperan obyektif buat melindungi netralitas serta non diskriminasi(Bappenas, 2008). Prinsip pengelolaan pemerintahan yang bersih tercermin dalam UU Nomor. 1. Keputusan Nomor. 28 tahun 1999 mengendalikan tentang“ Prinsip- Prinsip Administrasi Negeri”, yang mengendalikan tentang“ korupsi, tidak terdapat korupsi, kolusi serta nepotisme”. Asas- asas universal buat mewujudkan pemerintahan yang bersih merupakan selaku berikut:(a) asas kepastian hukum,(b) asas kedisiplinan negara,(c) asas kepentingan universal,(d) asas keterbukaan,(e) asas kedisiplinan. asas proporsionalitas,(f) asas handal,(gram) asas akuntabilitas. (Azlina & Amelia, 2015)
2. Good governance ialah Tata kelola yang baik dimaksud selaku tata kelola yang baik dalam sesuatu industri yang dilandasi oleh etika profesi dalam melaksanakan bisnis. Tata kelola yang baik merupakan wujud menerima berartinya seperangkat peraturan perundang- undangan, ataupun ialah tata kelola yang baik yang mengendalikan ikatan, guna, serta kepentingan seluruh pihak dalam bisnis serta pelayanan publik. Timbulnya konsep GG di Indonesia ialah reaksi atas aksi pengelola industri yang tidak mencermati stakeholders. Perihal ini nampak jelas semenjak terbentuknya krisis di Indonesia semenjak tahun 1997. Krisis ini membagikan pelajaran berharga, ialah pembangunan yang dicoba sepanjang ini belum didukung oleh struktur ekonomi yang kokoh. Nyaris seluruh pengusaha besar kita salah urus, salah urus, penuh korupsi, kolusi serta nepotisme(Trisnaningsih, 2007). Good Governance pula ialah tata pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negeri yang baik, maupun administrasi yang baik yang berlandas dini prinsip transparansi, partisipasi serta akuntabilitas guna mengendalikan ikatan antara pemerintah, dunia usaha swasta, serta warga(Bappenas, 2008).

Clean Governance berhubungan erat dengan Good Governance sebab keduanya pula mempunyai guna yang silih berkaitan ialah buat pemerintahan yang lebih baik serta leluasa dari KKN.

B. E- Government

Sebutan e- government berasal dari bahasa asing yang ialah penyingkatan dari electronic government ataupun pemerintah elektronik. E- Government ialah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik buat tingkatkan mutu layanan publik secara efektif, efisien serta interaktif. Dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi data serta komunikasi tercipta suatu sistem manajemen serta kegiatan kerja di area pemerintahan. e- government ataupun electronic government ialah sesuatu upaya buat memberitahukan wujud pemerintahan yang berbasis elektronik. Di dalam novel E- government in action(2005: 5) melaporkan E- government merupakan sesuatu usaha menghasilkan atmosfer pelayanan pemerintah yang cocok dengan objektif bersama(shared goals) dari beberapa komunitas yang berkepentingan, oleh sebab itu visi yang dicanangkan pula wajib mencerminkan visi bersama dari pada stakeholder yang terdapat.

C. Konsep E- Government

Secara universal ada 4(empat) konsep interaksi antar pelakon dalam e- government, ialah:

1. G to C(Government to Citizens), Government dengan Citizen ialah sesuatu ikatan antara pemerintah dengan rakyat sehingga terdapatnya akses data yang bisa dimanfaatkan/ diperoleh warga buat kepentingannya.
2. G to Gram(Government to Governments) Menghubungkan antara pemerintah dengan pemerintah. Yang diartikan pemerintah dengan pemerintah merupakan antara Pemerintah pusat dalam sesuatu negeri dengan Pemerintah daerah
3. G to B(Government to Business) Government to business ialah kedekatan antara pemerintah dengan pelakon baik di dalam negara ataupun di luar negara. Terdiri dari transaksi- transaksi elektronik dimana pemerintah sediakan bermacam data yang diperlukan untuk golongan bisnis buat bertransaksi dengan pemerintah.
4. G to E(Government to Employees) ialah Ikatan antara pemerintah dengan pegawai baik pegawai negara ataupun selaku karyawan/ pekerja pemerintah. Bertujuan buat tingkatkan kinerja serta kesejahteraan para pegawai negara ataupun karyawan pemerintahan.

Tetapi, secara universal tujuan dari keempatnya sama, ialah buat sediakan akses data, serta pelayanan secara efektif pada pihak lain baik antar pemerintah wilayah, dengan warga, dengan karyawan pemerintah wilayah ataupun dengan pelakon bisnis. (Siau serta Long, 2009).

Metode Penelitian

Riset ini memakai tipe riset kualitatif deskriptif ialah periset mendeskripsikan serta menganalisis objek riset. Deskripsi serta analisis tersebut dicoba dengan lewat sumber informasi primer serta sumber informasi sekunder. Sedangkan itu dalam metode pengumpulan informasi lewat observasi, akses internet/ websait serta dokumentasi. Metode analisis informasi dalam riset ini dengan memakai pengumpulan informasi, reduksi informasi, penyajian informasi serta kesimpulan ataupun verifikasi.

Riset ini dilakukan di kabupaten katingan, provinsi kalimantan tengah. Perihal ini, disebabkan kabupaten katingan ialah sesuatu daerah di provinsi kalimantan tengah yang pula mempraktikkan e- government di dalam menyelenggarakan tugas otonomnya. Semacam yang tertuang dalam peraturan Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Bupati Katingan No 53 Tahun 2018 Tentang Strategi Menerima Aspirasi Warga Lewat Layanan E- Aspirasi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Kabupaten Katingan. Perihal ini meyakinkan kalau kabupaten katingan melaksanakan suatu pelayanan untuk masyarakat nya dalam inovasi baru ialah dengan sisyem elektronik yang mulai di tahun 2016, meski dalam implementasinya dapat dikatakan belum sesuai dengan harapan.

Hasil dan pembahasan

1. clean governmance serta good governance di kabupaten katingan.

Lahirnya otonomi menuju pada transformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi jadi desentralisasi. Dalam masa otonomi wilayah, kekuasaan serta tanggung jawab diberikan buat mengelola sumber energi keuangan guna menjamin kemakmuran rakyatnya. Sebagian tugas yang tercantum dalam sistem otonomi wilayah merupakan: awal, tingkatkan efisiensi serta daya guna pengelolaan sumber energi wilayah; kedua, tingkatkan mutu pelayanan publik serta kesejahteraan warga; kedua, memberdayakan warga serta menghasilkan ruang untuk mereka buat berpartisipasi dalam reformasi otonomi warga. Sistem pengelolaan keuangan wilayah. Buat mewujudkan tata pemerintahan yang baik,

pemerintah berupaya buat membentuk pemerintahan yang bersih serta berwibawa, ialah tata pemerintahan yang baik.

Pada Selasa(9/ 10/ 2018), bertepatan dengan sosialisasi rencana replikasi Puja Indah, kegiatan sosialisasi Regional Innovative Government Award(IGA) Indeks Inovasi Wilayah(IGA) Kabupaten Katingan diselenggarakan di Aula Bappelitbang Kabupaten Katingan. Kegiatan ini ialah tindak lanjut dari rapat tutorial teknis serta koordinasi indeks inovasi wilayah yang dilaksanakan di Jakarta oleh Puslitbang Wilayah Tubuh Litbang Departemen Dalam Negara(17/ 9/ 2018).

Dalam sambutannya dikala membuka kegiatan, Bupati Katingan, Sakariyas, mengantarkan berartinya kenaikan kinerja pemerintah lewat budaya inovasi dalam bekerja dalam melayani warga. Upaya Pemerintah Kabupaten Katingan dalam tingkatkan energi saing lewat inovasi wilayah sudah dituangkan dalam Visi serta Misi Pembangunan Wilayah ialah dalam misi awal yang berbunyi“ Menghasilkan Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, serta Inovatif dan Mewujudkan Supremasi Hukum”. serta pula tersirat dalam Misi kedua ialah“ Tingkatkan Perekonomian Yang Berdaya Saing serta Kemandirian Pangan”.

Lewat pengukuran Indeks Inovasi Wilayah serta evaluasi IGA ini diharapkan bisa memacu kenaikan energi kreatiitas serta inovatif para pelayan warga di Katingan dalam membagikan pelayanan. Energi saing wilayah dikala ini jadi salah satu parameter dalam konsep kota berkepanjangan.Tingkatan energi saing sesuatu wilayah pula jadi salah satu dimensi kesejahteraan wilayah. Pemerintah dalam sebagian regulasi pula menekankan berartinya Kepala Wilayah melaksanakan inovasi buat mendesak daya guna pelayanan publik, menghasilkan nilai tambah, dan terbuka dalam persaingan dalam negeri serta internasional.

Berkaitan dengan perihal itu, buat mendesak tingkatan energi saing serta optimalisasi otonomi wilayah, hendak dicoba pengukuran tingkatan inovasi di sesuatu wilayah lewat Indeks Inovasi Wilayah. Lewat indeks inovasi dimaksudkan buat memetakan daerah- daerah yang inovatif serta hendak diberikan penghargaan nantinya lewat Innovative Government Award(IGA). Perihal tersebut di informasikan oleh Kepala Pusat Inovasi Teknologi BPP Kemendagri, Drs. Safrizal ZA, Meter. Sang dalam paparannya bertajuk Pembinaan serta Pendampingan Inovasi Wilayah dalam Memesatkan Good Governance di Kabupaten Katingan. Daya guna e- government di kabupaten katingan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sehubungan dengan peraturan bupati katingan provinsi kalimantan tengah peraturan bupati katingan no 61 tahun 2019 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan

pemerintahan wilayah. kalau buat menunjang tata kelola pemerintahan yang efisien, efesien, transparan serta akuntabel dan pelayanan publik yang bermutu serta terpercaya dibutuhkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah, kalau dalam rangka buat membagikan penguatan regulasi, arah, serta landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Wilayah hingga dibutuhkan pengaturan menimpa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah yang selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Katingan. Pembagian Urusan Bidang Komunikasi serta Informatika Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah sebagaimana sudah diganti sebagian kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pergantian Kedua Atas Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah kalau pengelolaan data serta komunikasi publik di wilayah jadi kewenangan Pemerintah Wilayah. (Katingan, 2019)

1. G to C(Government to Citizens), Government dengan Citizen ialah sesuatu ikatan antara pemerintah dengan rakyat sehingga terdapatnya akses data yang bisa dimanfaatkan/ diperoleh warga buat kepentingannya. Berikut sebagian pelaksanaan Government to Citizen/ Customer yang di jalani pemerintahan kabupaten katingan dalam pelayanan untuk masyarakat : sistem pajak online, layanan kesehatan, web pencari informasi kabupaten, penerbitan dokumen individu(KTP, Akte, KK, Paspor dll), kantor imigrasi serta lain sebagainya.

2. G to G(Government to Governments) Menghubungkan antara pemerintah dengan pemerintah. Yang diartikan pemerintah dengan pemerintah merupakan antara Pemerintah pusat dalam sesuatu negeri dengan Pemerintah wilayah.

3. G to B(Government to Business) Government to business ialah kedekatan antara pemerintah dengan pelakon baik di dalam negara ataupun di luar negara. Terdiri dari transaksi- transaksi elektronik dimana pemerintah sediakan bermacam data yang diperlukan untuk golongan bisnis buat bertransaksi dengan pemerintah. Di dalam pelaksanaan G2B kabupaten katingan mempraktikkan perizinan baik perizinan usaha umkm serta wujud usaha lainnya secara free, terkecuali perizinan jualan minuman beralkohol, memperkerjakan tenaga asing, serta mendirikan bangunan dll yang watak nya terkandung dalam pajak wilayah serta redistribusi wilayah,

undang-undang nomor. 28 tahun 2009 tentang pajak wilayah serta redistribusi wilayah.

4. G to E(Government to Employees) ialah Ikatan antara pemerintah dengan pegawai baik pegawai negara ataupun selaku karyawan/ pekerja pemerintah. Bertujuan buat tingkatkan kinerja serta kesejahteraan para pegawai negara ataupun karyawan pemerintahan. Implentasinya merupakan:

BPJS Kesehatan Aplikasi BPJS Kesehatan ini jadi asuransi yang dipunyai oleh tiap pekerja di kabupaten katingan kepada ASN. Tiap bulan anggota dimintai iuran dengan nominal tertentu, tujuannya bila terdapat pegawai ataupun karyawan sakit telah tidak butuh lagi membayar bayaran rumah sakit, seluruh telah dicover dengan BPJS Kesehatan. Jadi buat jaminan kesehatan para pegawai ataupun karyawan beserta keluarganya telah nyaman.

BPJS Ketenagakerjaan Aplikasi BPJS Ketenagakerjaan ini membagikan sarana kepada seluruh anggota buat jaminan hari tua. Tiap bulannya per anggota dimintai potongan iuran berapa persen dari pendapatan pokok. Nantinya saldo yang terkumpul dalam akun BPJS Ketenagakerjaan serta hendak diakumulasikan sehingga dapat diambil sehabis tidak bekerja ataupun pensiun.

Yang mana tujuan dari e- government itu seluruh yakni antara lain:

1. Tingkatkan kualitas layanan publik
2. Terjadinya pemerintahan yang bersih, transparan serta menanggapi tuntutan perubahan
3. Revisi organisasi, sistem manajemen serta tata kelola
4. Pembuatan jaringan data serta transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu serta posisi, dan dengan bayaran yang Tingkatkan kualitas layanan publik Terjadinya pemerintahan yang bersih, transparan serta menanggapi tuntutan pergantian Revisi organisasi, system manajemen serta tata kelola Pembuatan jaringan data serta transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu serta posisi, dan dengan bayaran yang terjangkau warga;
5. Pembuatan ikatan interaktif dengan dunia usaha; Pembuatan mekanisme serta saluran komunikasi dengan seluruh lembaga negeri dan penyediaan sarana diskusi publik;
6. Pembuatan sistem manajemen serta proses kerja yang transparan serta efektif, dan memperlancar transaksi serta layanan antar pemerintah

Kesimpulan dan saran

A. KESIMPULLAN

E- Government ialah sesuatu sistem TI yang dibesarkan oleh pemerintah dalam membagikan opsi kepada warga, buat memperoleh kemudahan mengakses data serta pelayanan publik guna mewujudkan clean and good governance pada sesuatu negeri. Pertumbuhan sistem e-government di Indonesia secara kuantitas mulai bertambah tetapi secara mutu masih belum mencukupi disebabkan implementasi e- government belum menyeluruh pada segala daerah serta masih berperan selaku penyedia data statik saja. Guna tingkatkan pengembangan e- government di Indonesia baik dari segi kuantitas ataupun mutu diperlukannya komitmen pemerintah dalam melaksanakan penyempurnaan pengembangan e- government paling utama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi dan sosialisasi di internal pemerintah ataupun kepada warga. Dikala ini, salah satu contoh implementasi e- government yang sudah diaplikasikan di Indonesia merupakan e- procurement. Lewat e- procurement, pemerintah berharap bisa jadi sistem pengadaan benda serta jasa yang akuntabel serta terbuka guna membetulkan sistem pengadaan secara manual. E- government ialah perlengkapan pendukung tercapainya clean and good governance, sebab Indonesia masih baru mengimplementasikan e-government serta belum tumbuh kilat hingga clean and good governance di Indonesia belum tercapai. Tetapi tidak menutup mungkin pada masa mendatang pengembangan implementasi e- government Indonesia hendak sukses.

Riset ini cuma mempelajari pertumbuhan serta contoh pengimplementasian e- government pada Pemerintah Indonesia dengan mengambil contoh pada sebagian departemen serta pemerintah wilayah bersumber pada pulau. Untuk periset berikutnya yang mau memakai riset ini selaku bahan referensi diharapkan bisa mempelajari lebih mendalam menimpa e- government pada pemerintah kabupaten serta kota di Indonesia. Pemanfaatan hendak sistem e- government di Indonesia sangat diperlukan, hingga diharapkan pemerintah lebih mencermati penerapan e- government lewat penyempurnaan konsep serta strategi guna tingkatkan pengembangan e government di segala pelosok negara. Apabila dicoba lebih sungguh- sungguh serta terdapatnya komitmen dari pemerintah hingga penerapan e- government pada giliranannya hendak sukses diimplementasikan serta sanggup membetulkan kualitas pelayanan publik demi terciptanya good governance serta clean governance.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Kepada pemerintah kabupaten katingan agar dapat mengoptimalkan e-government ini di dalam penerapan kinerja/sistem pemerintahannya agar mempermudah layanan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan baik dalam administrasi maupun mengases data serta melihat keterbukaan pemerintah terhadap masyarakatnya dalam mengatur dan mengelola tata pemerintahan baik dari segi keuangan maupun informasi serta layanan publik.
2. Kepada pemerintah kabupaten katingan harus mampu melihat dan meneliti di lapangan untuk memkasimalkan dalam pembangunan dan penerpan e-goverment ini baik dalam segi infrastruktur, ekonomi, politik dan budayanya serta pemerintah mampu menjaring dan membuat pemahaman kepada masyarakat penting dan baiknya layanan elektronik ini dengan sosialisasi maupun pelatihan baik secara daring maupun tatap muka.
3. Kepada masyarakat kabupaten katingan agar dapat berinovasi dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, serta mendorong dan mendukung pemerintah agar sistem layanan e-government ini lebih di perhatikan dan di matangkan karena ini juga membantu masyarakat dalam menerima layanan yang efesien, trnsparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat juga mampu membuat karya-karya baik aplikasi, web dan sebagainya di dalam membantu pemerintah mewujudkan clean and good governance.

Daftar Pustaka

- Azlina, N., & Amelia, I. (2015). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), 11. <https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1409>
- Katingan, P. B. (2018). *Peraturan Bupati Katingan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Strategi Menerima Aspirasi Masyarakat Melalui Layanan E-Aspirasi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan* (p. 8).
- Katingan, P. B. (2019). *Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (p. 17).
- Narang, A. T. (2019). GoodGovernance.pdf. *Jurnal Yure Humano*, V(15), 17. <http://repository.uki.ac.id/4131/>
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Goverment System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Government Di Indonesia. *Jeam*, XI(1), 19.